



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM,
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, BADAN USAHA JASA AIR,
BADAN USAHA MILIK DAERAH, DAN BADAN USAHA MILIK DESA**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta - 13120
Telepon: (021) 85909204, Email: dep4dir05@bpkp.go.id

Nomor : PE.02.03/LKIN-147/D405/3/2023 27 Juni 2023
Hal : Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan
Badan Layanan Umum, Badan Layanan
Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan
Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik
Desa

Yth. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut:

A. Capaian *Outcome* Triwulan II Tahun 2023

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi TW II	Capaian (%)		Rata-rata Capaian s.d. TW II (%)
			Tahun 2023	s.d. TW II		Tahun 2023	s.d. TW II	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah							
1.1	Jumlah BUMN dengan Kinerja Sehat	Jumlah	1	1	2	200,00	200,00	200,00
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional							
2.1	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Jumlah	1	0	1	100,00	100,00	100,00
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha							
3.1	Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik	Jumlah	1	1	2	200,00	200,00	200,00
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMDES							
4.1	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan	Jumlah	2451	2114	2492	101,67	117,88	108,94

No.	Sasaran Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi TW II	Capaian (%)		Rata-rata Capaian s.d. TW II (%)
			Tahun 2023	s.d. TW II		Tahun 2023	s.d. TW II	
4.2	Jumlah BUMDes yang berkontribusi kepada perekonomian Desa	Jumlah	256	0	-	0,00	100,00	
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN/D							
5.1	Jumlah BUMN dengan tata kelola korporasi baik	Jumlah	2	2	2	100,00	100,00	82,00
5.2	Jumlah BUMD dengan tata kelola korporasi baik	Jumlah	33	25	16	48,48	64,00	
6	Meningkatnya Kualitas Kesehatan BUMD dan BLU/BLUD							
6.1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	Jumlah	277	259	272	98,19	105,02	100,26
6.2	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	Jumlah	89	89	85	95,51	95,51	
7	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU							
7.1	Persentase BUMN dengan MRI \geq Level 3	Jumlah	1	1	2	200,00	200,00	99,70
7.2	Persentase BUMD dengan MRI \geq Level 3	Jumlah	350	350	234	68,86	68,86	
7.3	Persentase BLU/BLUD dengan MRI \geq Level 3	Jumlah	152	152	116	76,32	76,32	
7.4	Persentase BUMN dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	Jumlah	2	2	2	100,00	100,00	
7.5	Persentase BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	Jumlah	32	28	19	59,38	67,85	
7.6	Persentase BLU/BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	Jumlah	29	27	23	79,31	85,18	
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Akuntan Negara							
8.1	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan	Indeks Skala 100	80	0	0	0,00	100,00	100,00
8.2	Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan	Jumlah	1	0	1	100,00	100,00	

No.	Sasaran Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi TW II	Capaian (%)		Rata-rata Capaian s.d. TW II (%)
			Tahun 2023	s.d. TW II		Tahun 2023	s.d. TW II	
	teknologi informasi							
8.3	Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan	Jumlah	1	0	1	100,00	100,00	
9	Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Akuntan Negara							
9.1	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	0	-	0,00	100,00	100,00
9.2	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100	0	-	0,00	100,00	
Rerata Capaian								121,21

Kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana Tabel 1 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah
---	--

Pencapaian Sasaran Strategis (sastra) 1 ditunjukkan dengan pencapaian satu indikator kinerja yaitu jumlah BUMN dengan kinerja sehat.

Uraian kinerja atas indikator kinerja sastra 1 adalah sebagai berikut:

<p style="text-align: center;">1.1. Jumlah BUMN dengan kinerja sehat</p>	<p>Jumlah BUMN dengan kinerja sehat, dari sisi kinerja keuangan, merupakan kondisi prasyarat bagi BUMN untuk dapat memberikan kontribusi secara fiskal kepada negara, karena untuk dapat memberikan kontribusi pajak (PPH Badan) dan menyetorkan dividen, suatu BUMN harus memiliki kinerja keuangan yang sehat terlebih dahulu.</p> <p>Indikator ini diukur menggunakan 5 dimensi ICORPAX, yaitu:</p>
--	--

1. Dimensi Akuntabilitas Korporasi pada Pembangunan Nasional
2. Dimensi Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara;
3. Dimensi Kepatuhan dan Efektivitas Operasional;
4. Dimensi Efektivitas Sistem Tata Kelola; dan
5. Dimensi Efektivitas Pengendalian Fraud.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa Tahun 2022 sebanyak 1 BUMN dengan Kinerja Sehat.

Per Triwulan II Tahun 2023 telah dilakukan pengawasan terhadap Perum Jasa Tirta I dan Perum Jasa Tirta II dengan hasil kinerja "Sehat". Dengan begitu capaian kinerja atas BUMN dengan kinerja sehat Tahun 2023 sebesar 200% dari target yang ditetapkan.

2

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional

Pencapaian Sasaran Strategis (Sastra) 2 ditunjukkan dengan pencapaian satu indikator kinerja yaitu jumlah PSN yang tercapai sesuai target.

Uraian kinerja atas indikator kinerja sastra 2 adalah sebagai berikut:

2.1
Jumlah PSN
yang
tercapai
sesuai
target

Jumlah PSN yang mencapai target adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan oleh BUMN yang capaian fisik proyek mencapai atau melebihi target fisik pada tahun yang bersangkutan.

Indikator ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan Proyek Strategis Nasional mencapai target yang ditetapkan. Indikator ini diukur berdasarkan jumlah PSN dengan progres fisik mencapai atau melebihi target fisik yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan. Target PSN pada Triwulan II Tahun 2023 ditetapkan target progress fisik 37%.

Sampai dengan Triwulan II telah tercapai progress fisik sebesar 38,69% PSN. Dengan demikian capaian progress fisik melebihi target Triwulan II Tahun.

3

Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha

Pencapaian Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kepatuhan dan Efektivitas Badan Usaha, ditunjukkan dengan pencapaian satu indikator yaitu Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik.

Uraian kinerja atas indikator kinerja sastra 3 adalah sebagai berikut:

3.1 Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik

Indikator ini diukur menggunakan hasil skor Dimensi 3 ICORPAX, yaitu Kepatuhan dan Efektivitas Operasional dengan rincian parameter untuk masing-masing indeks sebagai berikut:

- a. Tingkat Kepatuhan (4%)
 - Permasalahan Hukum yang Dihadapi
 - Kepatuhan terhadap Regulasi Industri Tertentu
- b. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) (6%)
 - Keselarasan Program TJSL dengan Program prioritas pencapaian SDG's
 - Keberadaan Program TJSL yang mendukung bisnis inti dan menciptakan *Creating Share Value (CSV)* bagi perusahaan
 - Jumlah mitra binaan yang naik kelas melalui peningkatan kapasitas usaha
- c. Tingkat Kepuasan (6%)
 - Indeks Kepuasan Pelanggan
 - Indeks Kepuasan Vendor
 - *Employee Engagement*
- d. Tingkat Efektivitas Proses Bisnis (9%)
 - Pemenuhan *Service Level Agreement*
 - Penerapan *E-Procurement*
 - Keberadaan Inovasi
 - Penerapan Teknologi Informasi
 - Pengelolaan SDM
- e. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Aset (5%)

- *Asset Management Policy*
- *Asset Management Plans*
- *Asset Portfolio*
- *ROA (Return on Asset)*
- *Fixed Assets Turnover*

Target kinerja Direktorat BLU, BLUD, BU Jasa Air, BUMD, dan BUM Desa pada Tahun 2023 sebanyak 1 badan usaha dengan efektivitas operasional “Baik” yang ditargetkan tercapai pada Triwulan II Tahun 2023.

Pada periode Triwulan II Tahun 2023 telah dilakukan penilaian ICORPAX terhadap Perum Jasa Tirta I dan Perum Jasa Tirta II dengan kategori “Efektivitas Operasional Baik”. Dengan demikian capaian jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik adalah 200% dari target yang ditetapkan.

4

Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMDES

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas BUMDES, ditunjukkan dengan pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan
2. Jumlah BUMDes yang berkontribusi kepada perekonomian Desa

Uraian kinerja atas 2 indikator kinerja sastra 4 adalah sebagai berikut:

4.1
Jumlah
Badan Usaha
Milik Desa
(BUMDes)
yang Mampu
Menyusun

BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan adalah BUMDes yang dapat menyusun laporan keuangan setelah adanya kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan dari BPKP.

Indikator Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan diukur berdasarkan hasil evaluasi atas keberhasilan BUMDes menyusun laporan keuangan setelah dilakukannya pembinaan dan pendampingan oleh BPKP.

Laporan
Keuangan

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2023 sebanyak 2.451 BUM Desa dengan rincian target hingga Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 2.114 BUM Desa.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 capaian Kinerja BUM Desa yang mampu menyusun laporan keuangan adalah sebanyak 2.492 BUMDes atau mencapai 117,88% berdasarkan target triwulanan dan 101,67% dari target Tahun 2023.

4.2
Jumlah BUM
Desa yang
berkontribusi
kepada
perekonomia
n desa

Pendirian BUM Desa diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan perekonomian desa. Untuk mencapai hal tersebut BPKP telah melakukan pengawasan terhadap pengembangan potensi desa. Potensi desa tersebut diharapkan dapat dikelola BUM Desa dalam rangka memberikan dampak peningkatan perekonomian di desa. Indikator Jumlah BUMDes yang mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian desa diukur berdasarkan hasil evaluasi atas keberhasilan BUMDes menyusun laporan keuangan setelah dilakukannya pembinaan dan pendampingan oleh BPKP.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2023 sebanyak 256 BUMDes dengan rincian belum ada target sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Target tersebut ditetapkan pada Triwulan III sebanyak 200 BUM Desa dan Triwulan IV sebanyak 56 BUM Desa.

Pengawasan terhadap BUM Desa yang berkontribusi kepada perekonomian Desa sampai dengan Triwulan II belum dilaksanakan. Dengan demikian capaian indikator ini sebesar 100% berdasarkan target triwulanan dan 0% berdasarkan target Tahun 2023. Kegiatan pengawasan atas BUM Desa yang

berkontribusi pada perekonomian desa akan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2023.

5

**Sasaran Strategis 5:
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN/D**

Pencapaian Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN/D, ditunjukkan dengan pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah BUMN dengan tata kelola korporasi baik
2. Jumlah BUMD dengan tata kelola korporasi baik

Uraian kinerja atas 2 indikator kinerja sastra 5 adalah sebagai berikut:

5.1
Jumlah
BUMN
dengan tata
kelola
korporasi
baik

BUMN memiliki peran penting sebagai agen pembangunan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, BUMN harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan untuk memastikan perusahaan berjalan pada koridor yang seharusnya. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 sebagai payung hukum bagi korporasi, khususnya BUMN agar menjalankan perusahaannya dengan tata kelola yang baik. Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, BUMN diharuskan melakukan assessment terhadap tata kelola, memiliki *risk register* dan menerapkan pengendalian internal. Penilaian penerapan GCG ditujukan untuk memastikan efektivitas penerapan dan perbaikan tata kelola BUMN.

Penilaian penerapan GCG pada BUMN/anak perusahaan didasarkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dan kriteria dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor 16 Tahun 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara. Asesmen GCG dilakukan melalui penilaian

atas 572 faktor yang diuji kesesuaian penerapannya. Hasil asesmen berupa skor GCG, sebagai dasar penentuan kategori penerapan GCG pada BUMN, yang terdiri dari lima kategori yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik, dan Tidak Baik. Indikator persentase BUMN dengan tata kelola korporasi baik diukur dengan menggunakan jumlah BUMN dengan tata kelola baik dibagi jumlah total BUMN.

Target kinerja Direktorat Pengawasan BLU, BLUD, BU Jasa Air, BUMD, dan BUM Desa pada Tahun 2023 sebanyak 2 BUMN dengan tata kelola korporasi baik. Per Triwulan II Tahun 2023 telah dilakukan penilaian GCG melalui pengawasan ICORPAX terhadap Perum Jasa Tirta I dan Perum Jasa Tirta II dengan hasil masing-masing “Sangat Baik” dan “Baik”. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 100%.

5.2
Jumlah
BUMD
dengan tata
kelola
korporasi
baik

BUMD dibentuk untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah. Aturan terkait perusahaan daerah bertujuan memastikan permodalan, sifat layanan, keleluasaan dalam mengelola aset dan organ kepengurusan terkait tata cara pengambilan keputusan. PP Nomor 54 Tahun 2017 mewajibkan BUMD menyesuaikan bentuk hukum menjadi perumda atau perseroda paling lambat sampai tahun 2017 dan mewajibkan penerapan “pengelolaan perusahaan yang baik” paling lambat tahun 2019.

BUMD dengan tata kelola korporasi baik adalah BUMD yang memiliki penerapan *corporate governance* dengan kategori “Baik”. Indikator ini diukur dengan menggunakan jumlah BUMD dengan tata kelola korporasi baik dibagi jumlah total BUMD.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2023 sebanyak 33 BUMD dengan rincian target sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 25 BUMD.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 telah dilakukan penilaian *mapping* terhadap BUMD Jasa Air dan BUMD Aneka Usaha, capaian indikator kinerja adalah sebesar 64% berdasarkan target Triwulanan dan 48,48% berdasarkan target Tahun 2023.

6

Sasaran Strategis 6:

Meningkatnya Kualitas Kesehatan BUMD dan BLU/BLUD

Pencapaian Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kualitas Kesehatan BUMD dan BLU/BLUD, ditunjukkan dengan pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat
2. Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat

Uraian kinerja atas 2 indikator kinerja sastra 6 adalah sebagai berikut:

6.1 Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat

Dalam rangka mencapai *return* yang tinggi dan sebagai salah satu tujuan pendiriannya maka BUMD harus memiliki tingkat kesehatan yang memadai.

Indikator ini diukur dengan menggunakan jumlah BUMD dengan kinerja minimal “Sehat” dibagi jumlah total BUMD. Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2023 sebesar 277 BUMD dengan rincian sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 259 BUMD dengan kinerja sehat.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 telah dilakukan Evaluasi Kinerja terhadap 391 BUMD Jasa Air, 49 BUMD Aneka Usaha, dan 27 BUMD Jasa Keuangan. Hasil evaluasi kinerja menemukan sebanyak 272 BUMD pada kategori “Sehat” dengan rincian 253 BUMD Jasa Air dan 19 BUMD Aneka Usaha. Dengan demikian capaian indikator kinerja ini adalah 105,02% berdasarkan target Triwulanan dan 98,19% berdasarkan target Tahun 2023.

6.2
Jumlah
BLUD
dengan
kinerja
sehat

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN tahun 2005 s.d. 2025, pembangunan diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik dasar antara lain Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, UU Nomor 44 Tahun 2009 mewajibkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) oleh seluruh Rumah Sakit Daerah.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Tujuan utama penerapan PPK BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Dengan menerapkan PPK BLUD, RSD diharapkan dapat beroperasi dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat dan lebih efisien, tanpa mengutamakan mencari keuntungan, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat. Salah satu cara untuk meyakinkan apakah tujuan penerapan PPK BLUD telah tercapai adalah dengan melakukan penilaian atas tata kelola/kinerja yang meliputi aspek keuangan dan non keuangan.

BLUD dengan kinerja "Sehat" adalah BLUD dengan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun asesor lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai katefori "Sehat".

Indikator ini diukur dengan menggunakan Jumlah BLUD dengan kinerja minimal "Sehat" dibagi jumlah total BLUD.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah pada tahun 2023 sebanyak 89 BLUD yang seluruhnya ditargetkan pada Triwulan II Tahun 2023.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 telah dilakukan penilaian kinerja terhadap 89 BLUD dengan hasil 85 BLUD berkinerja “Sehat”. Dengan demikian capaian BLUD berkinerja Sehat adalah sebesar 95,51% dari target tahun 2023.

7

Sasaran Strategis 7:

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

Pencapaian Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian *Intern* K/L/BU, ditunjukkan dengan pencapaian 6 (enam) indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3
2. Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3
3. Jumlah BLU/BLUD dengan MRI \geq Level 3
4. Jumlah BUMN dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3
5. Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3
6. Jumlah BLU/BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

Uraian kinerja atas 6 indikator kinerja sastra 7 adalah sebagai berikut:

7.1
Jumlah
BUMN
dengan MRI \geq
Level 3

Manajemen Risiko (MR) adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan perusahaan. Peran manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan yang cepat berubah, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan penyusunan manajemen strategis, mengamankan sumber daya dan aset yang dimiliki perusahaan, dan mengurangi pengambilan keputusan

yang reaktif dari manajemen puncak sehingga pada akhirnya dapat mengefektifkan upaya pencapaian tujuan perusahaan.

Asesmen tingkat maturitas penerapan manajemen risiko dimaksudkan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan manajemen risiko (*Risk Management Maturity Level*) pada Badan Usaha (BUMN, BUMD, BLUD). Tujuannya untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko, serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Manajemen risiko indeks (MRI) dengan level Maturitas ≥ 3 menunjukkan bahwa MR perusahaan, antaran lain telah memiliki kebijakan dan proses yang formal, seragam di seluruh unit, didokumentasikan, dirancang dengan baik, manajemen terkoordinasi di seluruh area bisnis, menggunakan infrastruktur MR dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, serta pengukuran dan pelaporan.

Target kinerja Direktorat Pengawasan BLU, BLUD, BU Jasa Air, BUMD, dan BUM Desa pada Tahun 2023 sebanyak 1 BUMN. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 telah dilakukan penilaian MR BUMN melalui pengawasan ICORPAX terhadap Perum Jasa Tirta I dan Perum Jasa Tirta II dengan capaian keduanya pada level 3. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini adalah 2 BUMN atau sebesar 200%.

7.2
Jumlah
BUMD
dengan MRI \geq
Level 3

Manajemen risiko indeks (MRI) dengan level Maturitas ≥ 3 menunjukkan bahwa MR perusahaan, antara lain telah memiliki kebijakan dan proses yang formal, seragam di seluruh unit, didokumentasikan, dirancang dengan baik, manajemen terkoordinasi di seluruh area bisnis, menggunakan infrastruktur MR dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, serta pengukuran dan pelaporan.

Indikator ini diukur dengan menggunakan jumlah BUMD, BPR, dan BPD yang dilakukan *assessment* maturitas dan *mapping* manajemen risiko dibagi dengan jumlah populasi BUMD, BPR dan

BPD. Capaian dihitung secara kumulatif atas hasil MRI yang telah dicapai pada periode sebelumnya.

Pengukuran indikator persentase badan usaha dengan MRI \geq Level 3 belum mengukur capaian atas maturitas manajemen risiko BUMD. Hal ini disebabkan karena hasil pengawasan yang dilakukan atas penerapan manajemen risiko BUMD belum mencerminkan nilai maturitas manajemen risiko. Pengawasan atas penerapan manajemen risiko BUMD yang telah dilakukan meliputi pengukuran atas pemenuhan 10 infrastruktur dasar (Unit Pengelola Risiko, kebijakan MR, panduan penerapan MR, laporan internal audit penerapan MR, peta jalan penerapan MR, hasil evaluasi kebijakan dan pedoman MR, sosialisasi kebijakan dan pedoman MR, diklat/*workshop* MR, rencana kegiatan unit pengelola risiko, profil risiko tingkat korporat).

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2023 sebanyak 350 BUMD.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 capaian kinerja indikator ini adalah 234 BUMD 66,86% dari target tahun 2023.

7.3
Jumlah
BLU/BLUD
dengan MRI \geq
Level 3

Manajemen risiko indeks (MRI) dengan level Maturitas \geq 3 menunjukkan bahwa MR BLUD, antara lain telah memiliki kebijakan dan proses yang formal, seragam di seluruh unit, didokumentasikan, dirancang dengan baik, manajemen terkoordinasi di seluruh area bisnis, menggunakan infrastruktur MR dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, serta pengukuran dan pelaporan.

Indikator ini diukur dengan menggunakan jumlah BLUD yang dilakukan *assessment* maturitas dan *mapping* manajemen risiko dibagi dengan jumlah populasi BLUD yang ada. Capaian dihitung secara kumulatif atas hasil MRI yang telah dicapai pada periode sebelumnya.

Pengukuran indikator jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3 belum mengukur capaian atas maturitas manajemen risiko BLUD. Hal ini disebabkan karena hasil pengawasan yang dilakukan atas penerapan manajemen risiko BLUD belum mencerminkan nilai maturitas manajemen risiko. Pengawasan atas penerapan manajemen risiko BLUD yang telah dilakukan meliputi pengukuran atas pemenuhan 10 infrastruktur dasar (Unit Pengelola Risiko, kebijakan MR, panduan penerapan MR, laporan internal audit penerapan MR, peta jalan penerapan MR, hasil evaluasi kebijakan dan pedoman MR, sosialisasi kebijakan dan pedoman MR, diklat/*workshop* MR, rencana kegiatan unit pengelola risiko, profil risiko tingkat korporat)

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2023 sebanyak 152 BLUD. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, capaian kinerja indikator ini adalah 116 BLU/BLUD atau 76,32%.

7.4
Jumlah
BUMN
dengan
Kapabilitas
SPI \geq Level 3

Dalam rangka mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, korporasi perlu mengevaluasi kualitas fungsi audit internal (Satuan Pengawasan Intern) untuk menilai kepatuhan terhadap *internal audit charter*. Standar dan kode etik, serta efisiensi dan efektivitas fungsi audit internal dalam memenuhi kebutuhan berbagai *stakeholders*-nya. Selain itu, untuk meningkatkan fungsi audit internal, SPI harus menilai kapabilitasnya dan melaksanakan rekomendasi perbaikan.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, pasal 28 ayat (6) menyebutkan bahwa Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan. Evaluasi kualitas fungsi pengawasan intern

tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya, Sekretaris Kementerian BUMN melalui Surat Keputusan Nomor SK016/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara menyatakan reviu (*assessment*) berkala dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap *internal audit charter*, standar dan kode etik dan efisiensi serta efektivitas fungsi audit internal dalam memenuhi kebetuhan dari berbagai *stakeholders*-nya.

Peraturan di atas memperkuat opini mengenai penguatan fungsi audit internal/Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN merupakan salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja melalui manajemen penyelenggaraan korporasi yang sehat dan kuat. Hal ini disebabkan audit internal memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan korporasi serta mencegah dilakukannya Tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Penilaian Kapabilitas SPI pada BUMN dilakukan dengan menggunakan konsep IACM untuk sektor korporasi. Kapabilitas SPI Level 3 diperoleh jika SPI mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Indikator ini diukur dengan menggunakan Jumlah BUMN dengan kapabilitas SPI Level 3 (dari skala 1-5) dibagi jumlah total BUMN. Target kinerja Direktorat Pengawasan BLU, BLUD, BU Jasa Air, BUMD, dan BUM Desa pada Tahun 2023 sebanyak 2 BUMN.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 telah dilakukan penilaian Kapabilitas SPI melalui pengawasan ICORPAX terhadap Perum Jasa Tirta I dan Perum Jasa Tirta II dengan capaian keduanya "Baik". Dengan demikian capaian kinerja indikator ini adalah 2 BUMN atau sebesar 100%.

<p>7.5 Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3</p>	<p>Selain BUMN, BUMD juga dipandang perlu untuk memiliki SPI dengan kapabilitas yang mampu mendorong dan mengendalikan pengelolaan BUMD tersebut dalam mencapai tujuan usahanya. Sebagaimana kapabilitas SPI pada BUMN, kapabilitas SPI pada BUMD juga dinilai dengan menggunakan konsep IACM untuk sektor korporasi. Kapabilitas SPI Level 3 diperoleh jika SPI mampu memberikan <i>assurance</i> secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian <i>intern</i>.</p> <p>Indikator ini diukur dengan menggunakan jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI Level 3 (dari skala 1-5) dibagi jumlah total BUMD. Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2023 sebanyak 32 BUMD dengan rincian sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 28 BUMD.</p> <p>Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, capaian BUMD dengan kapabilitas SPI \geq 3 adalah 19 BUMD atau sebesar 67,85% berdasarkan target Triwulanan dan 59,38% berdasarkan target Tahun 2023.</p>
---	--

<p>7.6 Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3</p>	<p>Selain BUMN/BUMD, BLU juga dipandang perlu untuk memiliki SPI dengan kapabilitas yang mampu mendorong dan mengendalikan pengelolaan BLU tersebut dalam mencapai tujuan usahanya. Sebagaimana kapabilitas SPI pada BUMN/BUMD, kapabilitas SPI pada BLU juga dinilai dengan menggunakan konsep IACM untuk sektor korporasi. Kapabilitas SPI Level 3 diperoleh jika SPI mampu memberikan <i>assurance</i> secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian <i>intern</i>.</p> <p>Indikator ini diukur dengan menggunakan jumlah BLU dengan kapabilitas SPI Level 3 (dari skala 1-5) dibagi jumlah total BLU. Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan</p>
--	---

Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2023 sebanyak 29 BLU/D dengan rincian sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 27 BLU/D.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, capaian BLU/D dengan kapabilitas SPI ≥ 3 adalah 23 BLU/BLUD atau sebesar 85,18% berdasarkan target Triwulanan dan 79,31% berdasarkan target Tahun 2023.

8

Sasaran Strategis 8:

Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Akuntan Negara

Pencapaian Sasaran Strategis 8: Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Akuntan Negara, ditunjukkan dengan pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan
2. Jumlah Layanan Eksternal yang dapat dijalankan menggunakan Teknologi Informasi
3. Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan

Uraian kinerja atas 3 indikator kinerja sastra 8 adalah sebagai berikut:

8.1 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan

Target indeks kualitas layanan eksternal Direktorat Pengawasan BLU, BLUD, BU Jasa Air, BUMD, dan BUM Desa pada tahun 2023 adalah sebesar 80 (skala 1 s.d. 100). Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 belum dilakukan survei kepuasan *stakeholders* yang direncanakan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2023.

8.2 Jumlah Layanan Eksternal yang dapat dijalankan menggunakan

Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa berperan dalam peningkatan GRC BUMN, BLU, BLUD, dan BUMD. Seiring perkembangan zaman maka GRC Badan Usaha tersebut dapat dipermudah dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi berupa aplikasi-aplikasi. Untuk itu diperlukan upaya BPKP dalam

Teknologi
Informasi

memberikan nilai tambah berupa penyediaan aplikasi yang berguna bagi badan usaha. Target layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan Teknologi Informasi (TI) pada tahun 2023 sebanyak 1 buah. Pada tahun ini telah dilakukan implementasi aplikasi keuangan BLUD RSUD terhadap 90 BLUD di Indonesia. Selain itu telah dilakukan pengembangan aplikasi penyusunan laporan keuangan BUM Desa yang ditargetkan dapat diimplementasikan pada tahun 2023.

Capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2023 Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa adalah 100%.

8.3
Jumlah
Inovasi
Layanan yang
Mampu
Memberikan
Dampak
Terhadap
Percepatan
dan
Peningkatan
Kualitas
Layanan

Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa senantiasa melakukan inovasi untuk dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan yang diberikan kepada *stakeholders*.

Target inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan pada tahun 2023 sebanyak 1 buah.

Capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2023 Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa adalah 100% berupa aplikasi penilaian mandiri atas kinerja terhadap 389 BUMD Jasa Air di seluruh Indonesia.

9**Sasaran Strategis 9:****Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Akuntan Negara**

Pencapaian Sasaran Strategis 9: Meningkatkan Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Akuntan Negara, ditunjukkan dengan pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase efektivitas Pengendalian *Intern* Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)
2. Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)

Uraian kinerja atas 2 indikator kinerja sastra 9 adalah sebagai berikut:

9.1 Persentase efektivitas Pengendalian <i>Intern</i> Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	Target indikator kinerja persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit Kerja) pada tahun 2023 adalah 70%. Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 belum dilakukan penilaian efektivitas pengendalian intern unit kerja yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2023.
---	--

9.2 Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Target indikator kinerja persentase penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian (RTP) (MRI Unit Kerja) adalah 100%. Kegiatan penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2023.
---	--

B. Dukungan APP terhadap Sasaran Kegiatan

Pelaksanaan Agenda Prioritas Pengawasan yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan pada Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Sektor	Tema
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah	Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah, dan Desa	Akuntabilitas Pengelolaan Kekayaan

			Negara/Daerah yang dipisahkan
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional	Percepatan Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar (PSN & Non PSN)
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha	Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah, dan Desa	Akuntabilitas Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah yang dipisahkan
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMDES		
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN/D		
6	Meningkatnya Kualitas Kesehatan BUMD dan BLU/BLUD		
7	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU		
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Akuntan Negara	Non APP	
9	Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Akuntan Negara		

C. Kendala Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, belum dijumpai kendala yang dapat menghambat pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan.

D. Capaian *Output* Triwulan II Tahun 2023

Realisasi output Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa Triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 48 laporan atau 185% dari target 26 Laporan. Rincian Capaian Output Laporan disajikan pada tabel berikut:

No	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Laporan	Realisasi Laporan	%
1	4225 FAG 028 052 A	Rekomendasi hasil pengawasan strategis nasional/daerah	1	0	0%
2	4225 FAG U31 101 A	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas kekayaan negara/daerah yang dipisahkan dan BLU/BLUD	9	6	67%
3	4225 FAG U31 201 A	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas kekayaan negara/daerah yang dipisahkan dan BLU/BLUD	4	20	500%
4	4225 UAG U21 052 A	Rekomendasi hasil pengawasan atas sektor pembangunan sumber daya manusia	1	2	200%
5	4225 UAG U22 101 A	Rekomendasi hasil pengawasan atas sektor infrastruktur dan konektivitas	1	1	100%
6	4225 UAG U22 201 A	Rekomendasi hasil pengawasan atas sektor infrastruktur dan konektivitas	5	7	140%
7	4225 UAG U23 201 A	Rekomendasi hasil pengawasan atas sektor pembangunan ekonomi	3	6	200%
8	4225 UAG U53 101 A	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	1	1	100%
9	4225 UAG U53 201 A	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	1	5	500%
Total			26	48	185%

E. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi keuangan Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan

Badan Usaha Milik Desa Triwulan II tahun 2023 adalah sebesar Rp921.792.300 atau 46,95% dari total anggaran tahun 2023 sebesar Rp1.963.526.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran	Jumlah Realisasi	%
1	4225 FAG 028 052 A	Rekomendasi hasil pengawasan strategis nasional/daerah	100.000.000	0	0,00
2	4225 FAG U31 101 A	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas kekayaan negara/daerah yang dipisahkan dan BLU/BLUD	101.000.000	90.704.400	89,81
3	4225 FAG U31 201 A	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas kekayaan negara/daerah yang dipisahkan dan BLU/BLUD	543.940.000	386.789.200	71,11
4	4225 UAG U21 052 A	Rekomendasi hasil pengawasan atas sektor pembangunan sumber daya manusia	194.000.000	147.891.000	76,23
5	4225 UAG U22 101 A	Rekomendasi hasil pengawasan atas sektor infrastruktur dan konektivitas	88.200.000	0	0
6	4225 UAG U22 201 A	Rekomendasi hasil pengawasan atas sektor infrastruktur dan konektivitas	149.000.000	64.372.400	43,20
7	4225 UAG U23 201 A	Rekomendasi hasil pengawasan atas sektor pembangunan ekonomi	105.000.000	92.628.800	88,22
8	4225 UAG U53 101 A	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	7.058.000	7.057.800	100,00
9	4225 UAG U53 201 A	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	675.328.000	132.348.700	19,60
Total			1.963.526.000	921.792.300	46,95

F. Penggunaan SDM

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai pada Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa sampai dengan Twirulan II Tahun 2023 sebanyak 27 orang dengan rincian sebagai berikut.

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Struktural	4
2	Auditor Madya	6
3	Auditor Muda	5
4	Auditor Pertama	4
5	Auditor Penyelia	2
6	Auditor Pelaksana	2
7	Keuangan dan Pengadministrasian Umum	1
8	Sekretaris	1
9	Arsiparis	1
10	Calon Auditor Pelaksana	1
Jumlah		27

G. Inovasi

Pada Tahun 2023 Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa melakukan tiga inovasi utama dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Inovasi	Keterangan
1	FORSA BLUD	Aplikasi penyusunan laporan keuangan BLUD Kesehatan. Telah diimplementasikan terhadap 170 BLUD di seluruh Indonesia.
2	Penilaian Kinerja Mandiri BUMD Jasa Air	Aplikasi <i>self assessment</i> terhadap kinerja BUMD Jasa Air. Telah diimplementasikan terhadap 389 BUMD Jasa Air di seluruh Indonesia.
3	FORSA BUM Desa	Aplikasi penyusunan laporan keuangan BUM Desa. Aplikasi ini sedang pada tahap

		pengembangan dan akan di <i>launching</i> pada akhir Bulan Juli.
--	--	--

Demikian kami sampaikan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa. Atas perkenaan Ibu Deputi untuk memberikan arahan lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Direktur,

Ditandatangani secara elektronik

Indra Khaira Jaya